



KOMISI ASEAN UNTUK PROMOSI DAN  
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

---



DISKUSI DAN REKOMENDASI TENTANG

# **PRAKTIK RUMAH AMAN DI ASEAN**

Refleksi dari lokakarya konsultasi nasional





# DAFTAR ISI

---

**03**

**BAGIAN 1 :  
PENGANTAR**

---

**05**

**BAGIAN 2 :  
KEBIJAKAN DAN  
KERANGKA HUKUM  
YANG RELEVAN**

---

**09**

**BAGIAN 3 :  
DISKUSI**

---

**42**

**BAGIAN 4 :  
REKOMENDASI**

---

**47**

**REFERENSI**

---

Foto sampul: menenun di Pusat  
Perlindungan Kesejahteraan Pathum  
Thani untuk Korban Perdagangan  
Orang, Thailand (kredit, Rawena  
Russell)



Penafian: Publikasi ini disusun oleh  
Ms Chen Chen Lee dan merupakan  
proyek Komisi ASEAN untuk  
Promosi dan Perlindungan Hak  
Perempuan dan Anak (ACWC),  
didukung oleh ASEAN-Australia  
Counter Trafficking program  
(ASEAN-ACT) yang didanai oleh  
Pemerintah Australia

Pandangan yang diungkapkan dalam  
publikasi ini tidak mewakili posisi  
atau pandangan resmi ASEAN atau  
negara anggota ASEAN, dan belum  
tentu pandangan Pemerintah  
Australia, atau institusi lainnya

# UCAPAN TERIMA KASIH

Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) memelopori inisiatif kebijakan dan program yang berdampak dan berkontribusi signifikan terhadap implementasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP), khususnya dalam merespons kebutuhan perlindungan perempuan dan anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Berdasarkan inisiatif-inisiatif ACWC terdahulu dan selanjutnya adopsi "Pedoman Sensitif Gender untuk Penanganan Perempuan Korban Perdagangan Orang" dan "Pedoman dan Prosedur Regional untuk Menangani Kebutuhan Korban Perdagangan Orang", ACWC memimpin implementasi "Proyek Multi- Proyek Tahunan tentang Peningkatan Kapasitas Petugas Garis Depan dalam Penanggulangan Perdagangan Orang dengan Menggunakan Pendekatan yang Berpusat pada Korban dan Sensitif Gender" ("Proyek"). Capaian dari Proyek ini mencakup diskusi yang lebih mendalam mengenai berbagai praktik rumah aman bagi korban perdagangan orang di ASEAN yang mengarah pada pengembangan dokumen ini untuk meningkatkan praktik rumah aman di kawasan.

ACWC menyampaikan penghargaannya yang sebesar-besarnya kepada seluruh Negara Anggota ASEAN atas dukungan yang diberikan termasuk menyelenggarakan lokakarya konsultasi nasional pada tahun 2021-2022 di Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Thailand, dan Vietnam, serta meninjau konsolidasi diskusi dan rekomendasi untuk memastikan landasannya berdasarkan konteks ASEAN.

ACWC mengapresiasi kepemimpinan yang luar biasa dari Yang Mulia Sri Danti Anwar, Perwakilan Indonesia untuk Hak-Hak Perempuan di ACWC, yang telah memimpin pengembangan dan finalisasi "Diskusi dan Rekomendasi ACWC mengenai Praktik Rumah Aman di ASEAN". Analisis ini menyajikan peluang, strategi, dan pembelajaran dalam mengatasi tantangan kompleks di rumah aman yang diperburuk oleh dampak pandemi COVID-19, serta memperbaiki situasi korban perdagangan orang yang mendapat dukungan di rumah aman atau fasilitas serupa.

ACWC mengucapkan terima kasih atas kemitraan yang kuat dengan Tim ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) dalam upaya penting ini khususnya dukungan ahli dari Ibu Chen Chen, konsultan yang ditugaskan oleh ASEAN- ACT yang membantu ACWC sepanjang proses konsultasi dan dalam mengembangkan rekomendasi yang diambil dari analisis diskusi Negara-negara Anggota ASEAN. ACWC mengharapkan dukungan berkelanjutan dari ASEAN-ACT dan Pemerintah Australia, khususnya dari Negara-negara Anggota ASEAN, untuk menerapkan rekomendasi ini di masing-masing rumah aman korban perdagangan orang.

Terakhir, ACWC mengucapkan terima kasih atas dukungan Sekretariat ASEAN dan koordinasi yang efektif melalui Divisi Pengentasan Kemiskinan dan Gender selama proses pengembangan dan penyelesaian capaian dokumen ini.

# BAGIAN 1 : PENGANTAR

Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) telah mendukung interpretasi dan penerapan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP) secara konsisten dan tegas sejak awal. ACWC telah mengembangkan beberapa publikasi untuk mendukung perlindungan korban seperti Pedoman Peka Gender untuk Penanganan Perempuan Korban Perdagangan Orang<sup>[1]</sup> dan Pedoman dan Prosedur Regional untuk Menangani Kebutuhan Korban Perdagangan Orang.<sup>[2]</sup>

Diskusi dan Rekomendasi ACWC tentang Praktik Rumah Aman di ASEAN dikembangkan untuk membahas peluang, strategi, dan pelajaran yang dapat dipetik dalam menghilangkan rumah aman tertutup dan memperbaiki situasi orang-orang yang diperdagangkan selama penyediaan rumah aman. Diskusi dan Rekomendasi ini mendapat informasi dari serangkaian lokakarya konsultasi nasional yang diadakan di enam negara Asia Tenggara – Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Thailand, dan Vietnam – dari Desember 2021 hingga Maret 2022. Lokakarya tersebut dihadiri oleh praktisi pemerintah dan non-pemerintah terkait. Dokumen ini juga mengacu pada analisis dan rekomendasi yang diberikan dalam studi rumah aman yang dilakukan oleh ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) pada tahun 2018.

Laporan ASEAN-ACT 2018 "Kebebasan bergerak untuk orang yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang: Analisis hukum, kebijakan dan praktik di wilayah ASEAN" adalah studi penelitian yang berfokus pada tiga negara ASEAN: Malaysia, Filipina, dan Thailand.<sup>[3]</sup> Secara khusus, laporan ini mengkaji kondisi rumah aman tertutup yang membatasi kebebasan bergerak penghuni baik di negara tujuan maupun di negara asal. Laporan menemukan bahwa kondisi rumah aman tertutup pada kenyataannya menyerupai fasilitas detensi karena desain fasilitas tersebut (misalnya meniru tahanan atau penjara) atau pembatasan mobilitas penghuni sebagai syarat tinggal mereka. Rumah aman yang dioperasikan oleh organisasi non-pemerintah (LSM) ternyata sama ketatnya dengan rumah aman yang dijalankan oleh Negara.



1] ASEAN (2016). Pedoman Peka Gender untuk Penanganan Perempuan Korban Perdagangan Orang. Jakarta: Sekretariat ASEAN.  
(<https://asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/Gender-Sensitive-Guidelines-for-Handling-Women-Victims-of-Trafficking-in-Persons-2016.pdf>)

[2] Tidak tersedia secara daring

[3] Marika McAdam (2018). Kebebasan bergerak bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang: Analisis hukum, kebijakan dan praktik di Kawasan ASEAN. ASEAN-Australia Counter Trafficking.  
([https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2021/04/Freedom-of-movement\\_with-disclaimer.pdf](https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2021/04/Freedom-of-movement_with-disclaimer.pdf))

# BAGIAN 2: KEBIJAKAN DAN KERANGKA HUKUM YANG RELEVAN

## 2.1 Hukum Internasional yang relevan tentang non-detensi terhadap korban

- Hak atas kebebasan bergerak (Pasal 12 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR))[4]
- Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 9(1) ICCPR)
- Hak untuk bekerja (Pasal 6(1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR))[5]
- Larangan detensi anak di bawah Konvensi Hak Anak (CRC)[6] dan Protokol Opsional tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak[7]
- Kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka (Pasal 15) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)[8]
- Hak penyandang disabilitas atas kebebasan bergerak (Pasal 18) Pada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)[9]

Prinsip dan Pedoman yang Direkomendasikan tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menetapkan bahwa "orang-orang yang diperdagangkan tidak boleh didetensi, didakwa, atau dituntut." [10] Pelapor Khusus tentang perdagangan orang telah mencatat bahwa orang-orang yang diperdagangkan telah didetensi di tempat yang disebut rumah aman tertutup di sejumlah negara, dan menyebutkan bahwa meskipun hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari paket bantuan, tidak ada korban kejahatan lainnya yang dikenai tindakan pembatasan tersebut untuk perlindungan mereka sendiri. [11]

[4] Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dibuka untuk penandatanganan pada 16 Desember 1966, 999. U.N.T.S 3, mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976. (<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>)

[5] Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dibuka untuk penandatanganan, 16 Desember 1966, 993 U.N.T.S. 3, mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976. (<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>)

[6] Konvensi Hak Anak, diadopsi oleh GA Res 44/25 tanggal 20 November 1989, mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. (<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>)

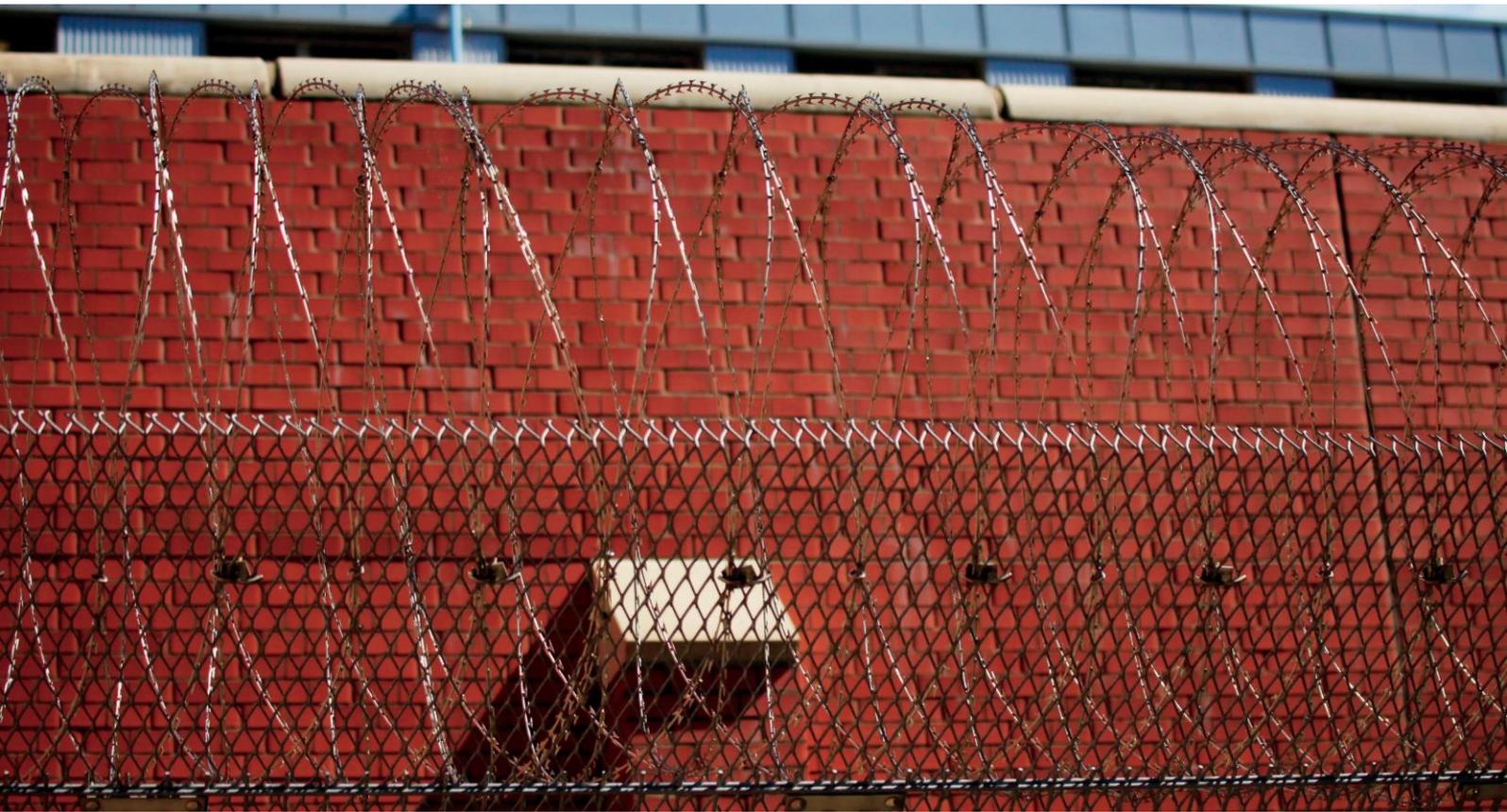
[7] Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, yang diadopsi oleh GA Res 54/263 tanggal 25 Mei 2000, mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002. (<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-sale-children-child>)

[8] Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, diadopsi oleh GA pada tanggal 18 Desember 1979, mulai berlaku pada tanggal 3 September 1981 (<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>)

[9] Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, diadopsi oleh GA Res 61/106 tanggal 13 Desember 2006, mulai pada tanggal 3 Mei 2008 (<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities>)

[10] Lihat Prinsip 7 yang Direkomendasikan dari Prinsip dan Pedoman yang Direkomendasikan tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang, Adendum, Laporan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, Dok. PBB. E/2002/68/Add.1 (20 Mei 2002).

[11] Komentar Umum No. 5 (2020) mengenai Hak Migran atas Kemerdekaan dan Kebebasan dari Detensi Sewenang-wenang oleh Pelapor Khusus tentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, Siobhán Mullally. 16 November 2020 (<https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/comments-special-rapporteur-draft-general-comment-no>)



## 2.2 Undang-undang dan kerangka kerja regional yang relevan tentang non-detensi terhadap korban

Pasal 14(8) Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP) menyatakan bahwa "Setiap pihak tidak boleh secara tidak wajar menahan orang yang telah diidentifikasi oleh otoritas yang berwenang sebagai korban perdagangan orang dalam detensi atau penjara, sebelum, selama, atau setelah proses perdata, pidana, atau administrasi terkait perdagangan orang." [12]

Pasal 16 Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Menentang Perdagangan Orang di Daerah Sub Regional Mekong (COMMIT MOU) mewajibkan enam negara anggotanya untuk "memastikan bahwa orang-orang yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang tidak didetensi oleh otoritas penegak hukum." [13]

## 2.3 Undang-undang nasional yang relevan tentang non-detensi terhadap korban

Hampir semua negara anggota ASEAN memiliki undang-undang atau pedoman domestik yang menyediakan rumah aman dan/atau akomodasi sementara untuk korban perdagangan orang.

Pasal 33 Undang-Undang Vietnam tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang menyatakan bahwa korban dapat diberikan rumah aman sementara. Selain itu, Keputusan Vietnam No. 62/2012/ND-CP, Penyediaan Dasar untuk Pendefinisian Korban Perdagangan dan Perlindungan Keselamatan bagi Korban dan Keluarganya menyebutkan penyediaan rumah aman sementara dalam Pasal 7.

Pasal 19 Undang-Undang Singapura tentang Pencegahan Perdagangan Orang menguraikan penyediaan tempat tinggal sementara dan layanan konseling bagi korban perdagangan orang.

Pedoman Operasional Tim Multi-Disiplin Thailand untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang mengatur pemindahan korban perdagangan orang ke rumah aman. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Anti Perdagangan Orang, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand akan memberikan bantuan kepada korban perdagangan orang, termasuk rumah aman.

Bagian 23 Undang-Undang Anti Perdagangan Orang Filipina menguraikan layanan wajib bagi orang-orang yang diperdagangkan, termasuk rumah aman darurat atau perumahan yang layak.

Pasal 42-47 Undang-Undang Anti-Perdagangan dan Anti Penyelundupan Migran Malaysia menyebutkan tempat perlindungan bagi orang-orang yang diperdagangkan.

Pasal 44-50 UU PDR Laos tentang Anti Perdagangan Orang menetapkan hak korban untuk mengakses bantuan termasuk rumah aman sementara. Selain itu, Pasal 40 UU PDR Laos tentang Perlindungan Hak dan Kepentingan Anak menetapkan langkah-langkah mendesak untuk perlindungan, termasuk kembali ke orang tua, atau rumah aman yang aman jika hal itu tidak memungkinkan.

Pasal 46 dan 52 UU Indonesia No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan pemerintah pusat dan provinsi untuk membangun rumah perlindungan dan trauma center untuk memberikan rehabilitasi sosial, bantuan repatriasi dan reintegrasi sosial. Pasal 223 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian (No. 31/2013) menyediakan akomodasi bagi orang asing korban perdagangan di Indonesia.

# BAGIAN 3 : DISKUSI

## 3.1 Terminologi dan pemahaman rumah aman tertutup

Di seluruh negara ASEAN yang dikonsultasikan untuk dokumen ini, berbagai istilah digunakan sehubungan dengan penyediaan rumah aman bagi korban perdagangan orang, termasuk 'akomodasi sementara', 'fasilitas perlindungan', 'penjagaan perlindungan', 'rumah aman', 'fasilitas kesejahteraan', dll. Penggunaan istilah 'fasilitas perlindungan' dan 'penjagaan perlindungan' menggarisbawahi persepsi yang berlaku bahwa rumah aman bagi para korban memiliki tujuan perlindungan yang kuat – terutama, perlindungan dari pelaku perdagangan orang dan ancaman lain – sebuah wawasan yang disorot dalam laporan tahun 2018 oleh ASEAN-ACT.

Ada konsensus umum bahwa korban perdagangan orang tidak boleh didetensi, dengan peserta lokakarya mengingat kembali ketentuan dalam Pasal 14 ACTIP yang meminta negara untuk tidak mendetensi atau menahan korban perdagangan orang secara tidak wajar atau menghukum mereka atas tindakan melawan hukum yang mereka lakukan sebagai akibat diperdagangkan.[14] Detensi dikaitkan dengan penahanan di fasilitas detensi migrasi, penjara, kurungan, dll, di mana korban diperlakukan sebagai kriminal atau pelaku kejahatan. Dengan demikian, sebagian besar pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah mengamati bahwa konsep dan praktik 'shelter-detensi' terkait dengan korban perdagangan orang tidak ada lagi, karena lebih ketatnya



kepatuhan terhadap undang-undang domestik dan penekanan yang lebih kuat pada hak asasi manusia para korban.

Pada saat yang sama, ada pula kebingungan mengenai perbedaan istilah yang digunakan tergantung pada pemangku kepentingan mana yang menggunakannya. Rumah aman dijelaskan sebagai 'terbuka', 'setengah-tertutup' dan 'tertutup', tanpa pemahaman bersama di tingkat nasional tentang apa sebenarnya arti istilah-istilah ini dalam praktiknya.

Sifat jangka pendek dari sebagian besar tempat tinggal rumah aman diangkat sebagai tandingan dari gagasan rumah aman tertutup. Di Filipina, korban perdagangan orang ditempatkan di fasilitas rumah perawatan (di bawah Program Pemulihan dan Reintegrasi untuk Orang yang diperdagangkan) untuk jangka waktu sementara di mana pekerja sosial bekerja dengan petugas kesejahteraan sosial dan pembangunan setempat memberi tahu keluarga mereka dan memproses kepulangan mereka dengan segera.

Penekanan ditempatkan pada mendukung keberhasilan penyatuan korban dengan keluarga mereka. Di Vietnam, para korban biasanya tinggal di rumah aman yang disebut Peace House yang dikelola oleh Persatuan Perempuan Vietnam selama tiga hingga enam bulan dan Shelter Nhan Ai (Rumah Kasih Sayang) yang didukung oleh Pacific Links, hingga

empat tahun. Peace House berfungsi sebagai tempat yang menyediakan layanan sementara seperti akomodasi yang aman, konseling psikologis, bantuan hukum, dan makan. Seorang pemangku kepentingan Thailand mengakui bahwa sebagian besar korban di Thailand ditempatkan di rumah aman tertutup, dan ini biasanya tidak menjadi masalah jika tinggal dalam waktu singkat. Namun, durasi litigasi yang panjang menyebabkan banyak korban ditempatkan di rumah aman dengan penjagaan untuk waktu yang lama.

Mendapatkan persetujuan dari korban sebelum masuk ke rumah aman ditawarkan sebagai salah satu cara untuk mengurangi kebebasan bergerak mereka yang terbatas. Pada praktiknya, mendapatkan persetujuan yang diinformasikan tampaknya menjadi norma di banyak negara ASEAN, di mana para korban diberi informasi tentang syarat tinggal, aturan penggunaan ponsel, kapan mereka bisa meninggalkan tempat dan dengan persyaratan apa, dan sebagainya. Namun, prosedur rutin untuk mendapatkan persetujuan dari korban, mengaburkan diskusi yang lebih dalam tentang apakah beberapa dari korban ini memiliki alternatifnya sendiri untuk memulai. Hal ini terutama berlaku bagi orang asing yang tidak punya tempat lain untuk dituju dan bagi mereka yang mempunyai pilihan lainnya termasuk ditempatkan di rumah detensi imigrasi atau penjara.



*Jika memang ada pilihan, pengelola rumah aman mungkin tidak menjelaskan kepada penghuni bahwa mereka bisa pergi. Mengingat trauma dan kurangnya otonomi yang terkait dengan perdagangan orang, korban kemungkinan akan enggan mengambil risiko berdampak negatif dengan angkat bicara.*

*Bagi korban asing, situasi migrasi mereka yang tidak teratur dapat berarti bahwa pembebasan segera tidak mungkin dilakukan, meskipun secara teori ada hak untuk pergi.*

*Permintaan untuk meninggalkan rumah aman utama yang dikelola pemerintah Thailand, misalnya, tidak dikabulkan sampai surat-surat yang diperlukan disahkan, sebuah proses yang dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.[15]*

Penekanan juga diberikan pada persetujuan di awal masa tinggal mereka, yang nyaris tidak menyebutkan apakah persetujuan diminta secara berkelanjutan. Sementara pengelola rumah aman mengatakan bahwa korban bebas untuk pergi kapan saja, dan sebagian korban yang pergi, ada banyak hambatan praktis yang harus diatasi.

Serupa dengan temuan dari laporan ASEAN-ACT 2018, tamasya yang didampingi dan kegiatan di luar rumah aman (seperti ke pantai, bioskop, arena bowling atau pusat perbelanjaan) dan akses ke pekerjaan dan pelatihan kejuruan disebut dalam konsultasi nasional 2022 sebagai contoh kebebasan bergerak.

Para pemangku kepentingan di PDR Laos menegaskan bahwa negara ini tidak memiliki shelter detensi, tetapi rumah aman 'setengah-tertutup'. Salah satu LSM di PDR Laos berkata bahwa penghuni rumah aman mereka memiliki hak penuh dan dapat membuat rumah aman mereka seperti rumah sendiri. Rumah aman memberikan berbagai kegiatan dan dukungan untuk para penghuni dan penghuni bisa berkomunikasi dan bertemu dengan keluarga mereka. Mencerminkan pendapat ini, Persatuan Perempuan Laos, yang bertanggung jawab untuk menyediakan rumah aman yang aman dan rehabilitasi fisik korban perdagangan orang (Perempuan) di negara ini, menyampaikan bahwa:

*Kami memiliki beberapa kegiatan untuk melepaskan ketegangan dan tekanan (penghuni) dan menyembuhkan mereka melalui ritual budaya. Kami juga mengajak mereka berjalan-jalan, misalnya ke pasar, keliling kota. Namun, (penghuni) akan didampingi oleh staf kami karena mereka masih di bawah tanggung jawab kami, dan kami bertanggung jawab atas keselamatan mereka.*

Persepsi 'kebebasan bergerak' dari sudut pandang korban diangkat tetapi tidak dibahas secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif korban perdagangan orang itu sendiri mungkin tidak cukup dipertimbangkan dan diasimilasi ke dalam program berbasis rumah aman di ASEAN. Namun, praktik baik internasional telah menunjukkan bahwa penyampaian program dan layanan berkualitas tinggi hanya dapat diinformasikan oleh pengetahuan dan pengalaman dari mereka yang berpartisipasi dalam program tersebut – orang-orang yang diperdagangkan. Seorang peserta lokakarya mengingatkan bahwa tidak menggunakan istilah 'shelter detensi' bukan berarti tidak terjadi dalam praktik. Jika korban merasa 'didetensi' atau jika mereka merasa bahwa kebebasan mereka telah dirampas, sebenarnya detensi akan terjadi, dan dalam benak korban, terlepas dari sebutan rumah aman itu menurut para penyedia layanan.



Kamboja telah mengembangkan sebuah Kebijakan Perlindungan Hak Korban Perdagangan Orang (Prakas No. 852), termasuk Standar Minimal Perlindungan Hak Korban Perdagangan Orang (Prakas No. 857) (2009) yang mengatur penyediaan layanan dan merawat para korban di rumah aman pemerintah dan LSM. Pasal 43 Perintah Anti Perdagangan Orang Brunei menyebutkan penyediaan rumah aman atau tempat tinggal sementara untuk orang-orang yang diperdagangkan.

[12] Lihat Pasal 14(8) Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, diadopsi oleh ASEAN pada tanggal 21 November 2015. (<https://asean.org/asean-convention-against-trafficking-in-persons-especially-women-and-children/>)

[13] Nota Kesepakatan mengenai Kerja Sama Menentang Perdagangan Orang di Daerah Sub Regional Mekong, diadopsi pada tanggal 29 Oktober 2004. Negara-negara anggota COMMIT adalah Kamboja, China, PDR Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam.

[14] Lihat juga Marika McAdam (2022) Implementasi Prinsip Non-Hukuman bagi Korban Perdagangan Orang di Negara-negara Anggota ASEAN-Australia Counter Trafficking. ([https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2022/04/Non-Punishment\\_print\\_smallsize.pdf](https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2022/04/Non-Punishment_print_smallsize.pdf))

[15] Anne Gallagher dan Elaine Pearson (2008), "Detensi Korban Perdagangan Orang di Rumah Aman: Analisis Hukum dan Kebijakan" ; Anne Gallagher dan Elaine Pearson, 'Biaya Kebebasan yang Tinggi: Analisis Hukum dan Kebijakan tentang Shelter Detensi bagi Korban Perdagangan Orang', Human Rights Quarterly 32 (2010) 73-114.

[16] Surtees R (2013). Setelah Diperdagangkan: Pengalaman dan Tantangan dalam (Re)Integrasi Orang-orang yang Diperdagangkan di Daerah Sub Regional Mekong, Bangkok, Thailand: UNIAP/ NEXUS Institute.

[17] Lihat <http://kredtrakarnhome.com/Home-USLeng.html>

[18] Model Shelter Bahagia adalah inisiatif baru oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand untuk menyediakan Rumah Aman sementara dan jangka panjang untuk korban perdagangan Orang Thailand dan non-Thailand. Model rumah aman Bahagia menekankan pada pengurangan trauma korban perdagangan Orang. Lihat <https://www.aseanact.org/story/happy-shelters/>

[19] Lihat Marika McAdam (2018). Kebebasan bergerak bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang: Analisis hukum, kebijakan, dan praktik di Kawasan ASEAN. ASEAN-Australia Counter Trafficking; Anne Gallagher dan Marika McAdam (ND). 'Catatan Informasi tentang Kebebasan Bergerak bagi Korban Perdagangan Orang'. ASEAN-Australia Counter Trafficking.

## 3.2 Komunikasi dengan keluarga dan pihak luar

Merampas akses telepon dari korban perdagangan orang untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, atau pengacara mereka merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan mereka. Mengisolasi korban dari orang-orang di luar rumah aman, meskipun berniat baik, dapat terlihat seperti hukuman dan detensi.

Pengelola rumah aman biasanya membatasi kunjungan keluarga dan memantau komunikasi para penghuni rumah aman. Namun, penelitian menunjukkan bahwa larangan menghubungi keluarga dapat menyebabkan tekanan emosional kepada korban karena mereka mengkhawatirkan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga mereka selama berada di rumah aman.

[16] Pemisahan keluarga dapat menyebabkan kecemasan, frustrasi, dan kesusahan yang mendalam bagi para korban.

Lokakarya konsultasi nasional mengangkat pertanyaan mengenai kepemilikan dan penggunaan ponsel oleh penghuni rumah aman, dan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka. Tak satu pun negara ASEAN yang disurvei untuk dokumen ini memiliki pedoman nasional mengenai hal ini; selain itu,

peraturannya berbeda dari satu rumah aman ke yang lainnya dalam satu negara.

Di Thailand, rumah aman yang dikelola negara telah melonggarkan aturan penggunaan ponsel, memungkinkan penghuni untuk menggunakannya hampir secara bebas selama jam kerja. Para penghuni dapat memanfaatkan fasilitas Wi-Fi dan menggunakan internet untuk memperoleh keterampilan kerja atau mengikuti berita di kampung halaman atau domisili mereka. Di masa lalu, mereka hanya diizinkan untuk menggunakan ponsel mereka dua kali dalam seminggu. Pusat krisis perempuan di Indonesia yang menyediakan tempat tinggal selama 14 hari untuk perempuan dan anak perempuan yang membutuhkan, mengatakan bahwa selama periode ini, penghuni tidak diizinkan untuk memiliki atau menggunakan ponsel mereka. Dalam beberapa kasus, itu karena ponsel itu telah digunakan baik oleh pelaku atau korban itu sendiri sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu ponsel itu disita sebagai bukti forensik. Dalam beberapa kasus, korban cemas mengenai percakapan teks dalam ponsel mereka ketika korban memberikan "persetujuan" kepada pelaku. Karena itu, menurut pusat krisis itu, mengambil ponsel membantu mencegah korban menjadi terlalu stres atas situasi mereka.

Para pemangku kepentingan ASEAN sepakat bahwa ada alasan keamanan yang mendesak untuk menyita ponsel korban, terutama karena kemampuan para pelaku perdagangan orang untuk menemukan keberadaan korban. Korban mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan lokasi rumah aman mereka ke para pelaku, atau pelaku dapat mengidentifikasi rumah aman dengan menggunakan aplikasi lacak yang sudah terpasang pada ponsel korban. Pengelola rumah aman dan pekerja sosial waspada terhadap korban yang dihubungi oleh pelaku atau keluarga, khususnya jika keluarga itu terlibat dalam pelecehan dan eksploitasi korban. Mereka khawatir hal itu akan mempengaruhi proses pemulihan korban serta kesediaan mereka untuk terus berpartisipasi dalam proses peradilan pidana. Praktisi menggarisbawahi kesulitan dalam menyeimbangkan risiko terhadap keselamatan dan kesejahteraan korban, dan hak korban untuk berkomunikasi dengan keluarga dan kontak dekat mereka. LSM Indonesia melaporkan bahwa mereka menjelaskan aturan penggunaan telepon dan ponsel di fasilitas rumah aman dan risikonya. Korban harus memberi persetujuan untuk ponsel mereka diambil. Jika perlu, penghuni rumah aman akan diberikan ponsel baru sebagai cara untuk mengurangi risiko korban dihubungi oleh para pelaku perdagangan orang.

Terkait dengan anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dilaporkan untuk memandu penanganan korban anak di rumah aman. Penyedia layanan menekankan tantangan penerapan prinsip ini dalam praktiknya. Di satu sisi, mereka harus menilai apakah penyatuan kembali dengan keluarga mereka adalah pilihan terbaik bagi sang anak. Hal ini bisa menjadi proses yang rumit tergantung pada keadaan anak dan ketersediaan alternatif yang layak. Di sisi lain, prosedur yang terlalu birokratis dan koordinasi yang buruk antara penyedia layanan telah menciptakan stres dan kebingungan yang tidak semestinya bagi semua orang. Sebuah LSM Indonesia berbagi pengalaman seorang anak yang dipindahkan dari rumah aman mereka ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC). Keluarga anak dilarang mengunjungi atau berbicara dengan anak tersebut. LSM tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka wajib mematuhi protokol keamanan yang diberlakukan RPTC dan akibatnya, mereka disalahkan oleh keluarga karena mencegah mereka berkomunikasi dengan anak mereka.

Seorang perwakilan dari Pusat Perlindungan dan Pengembangan Pekerjaan Kredtakarn[17] di Thailand menyampaikan bahwa pandemi telah mengubah aturan di mana penghuni rumah aman berkomunikasi dengan pihak luar. Sebelum COVID-19, orang tua diizinkan untuk mengunjungi rumah aman dan berbicara dengan anak mereka, sehingga penghuni tidak perlu memiliki ponsel. Dalam kasus ketika orang tua tinggal jauh dari rumah aman, staf akan mengatur waktu dan tanggal bagi anak untuk menelepon orang tua mereka menggunakan fasilitas telepon rumah aman. Dengan dibentuknya model Shelter Bahagia,[18] Pusat Perlindungan ini telah mengadopsi penggunaan aplikasi LINE untuk melakukan panggilan video jarak jauh, yang memungkinkan penghuni untuk melihat keluarga mereka dan ini membuat mereka lebih gembira dan lebih kooperatif. Pusat Perlindungan ini mewajibkan anggota staf untuk hadir jika pemakai telepon berusia di bawah 18 tahun. Ini untuk memastikan bahwa anggota staf dapat mengintervensi dan mendukung kesejahteraan anak jika orang tua berkomunikasi dengan buruk terhadap anak.



### 3.3 Alasan untuk membatasi kebebasan bergerak korban

Laporan ASEAN-ACT 2018 menemukan bahwa intervensi terhadap kebebasan bergerak korban seringkali dirasionalisasi berdasarkan tiga argumen umum: perlindungan, bantuan, dan penuntutan.[19]

Di seluruh negara ASEAN yang berpartisipasi, alasan ***Perlindungan*** menjadi alasan yang paling populer untuk menjaga korban perdagangan orang di rumah aman tertutup atau setengah tertutup. Alasan perlindungan berakar dari keyakinan bahwa korban perlu dilindungi dari para pelaku perdagangan orang dan yang lainnya yang mungkin terlibat dalam perdagangan mereka, termasuk perantara atau anggota keluarga. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa korban yang dapat bergerak bebas akan dilukai, dibunuh, atau dibujuk untuk tidak bersaksi melawan para pelaku perdagangan orang. Selain itu, diasumsikan bahwa korban yang dapat bergerak bebas akan membuat keputusan yang buruk, melarikan diri dan kembali ke para pelaku perdagangan orang dan/atau bentuk atau kondisi kerja yang eksploitatif.

Selain itu, dasar alasan perlindungan menyatakan bahwa orang-orang yang diperdagangkan perlu tinggal di rumah aman untuk mencegah mereka melukai diri sendiri atau orang lain. Banyak korban menderita masalah kesehatan psikologis dan mental akibat dilecehkan dan trauma. Seorang peserta LSM pada lokakarya konsultasi nasional menyebutkan perlunya mencermati beberapa korban di masa lalu yang pernah melakukan kekerasan fisik, cenderung menyakiti diri sendiri, atau terpaksa melakukan hubungan seksual yang berlebihan (kecanduan seks yang tidak sehat). Alasan perlindungan ini diperkuat dengan insiden intimidasi dan ancaman yang berulang dari para pelaku perdagangan orang dan yang lainnya terhadap korban (serta staf rumah aman), terutama jika mereka terlibat dalam kegiatan kejahatan terorganisir.

Pekerja sosial dan pengelola rumah aman menyuarakan keprihatinan mereka tentang kepraktisan tindakan memastikan keselamatan dan kesejahteraan klien-klien mereka jika korban tidak menetap di rumah aman. Kebutuhan untuk melindungi ini menjadi makin jelas ketika menyangkut anak-anak dan anak di bawah umur, yang tidak memiliki hak pilihan yang sama dengan orang dewasa dan lebih rentan terhadap penipuan dan pelecehan. Beberapa pemangku kepentingan mengaku bahwa kebebasan korban untuk masuk dan keluar dari rumah aman sesukanya itu mustahil. Seorang peserta Laos berpendapat perlunya mengontrol pergerakan korban karena "kami bertanggung jawab secara hukum atas hidup mereka selama tinggal bersama kami". Pandangan ini selaras dengan banyak pengelola rumah aman di negara-negara ASEAN. Pemangku kepentingan berulang kali menyorot tantangan dalam menyeimbangkan berbagai kebutuhan untuk keamanan, keselamatan, dan otonomi korban.

Meskipun bermaksud baik, pendekatan yang didasarkan pada dasar pemikiran perlindungan berisiko mempengaruhi penentuan nasib sendiri dan otonomi korban. Penelitian terhadap perempuan yang hidup di rumah aman menunjukkan bahwa mereka cenderung dipandang tidak mampu menjalankan kebijaksanaan mereka sendiri dan kehilangan kebebasan untuk membuat pilihan pribadi.[20] Ada risiko bahwa kondisi seperti itu dapat menciptakan kembali paksaan dan penolakan agen yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan orang. Pendekatan ini juga bertentangan dengan model perawatan berdasarkan informasi trauma yang ditujukan untuk memulihkan otonomi dan memperbaiki ketidakadilan, yang telah dilakukan oleh banyak pemangku kepentingan ASEAN.

Sehubungan dengan itu, alasan perlindungan ini menghalangi para pemangku kepentingan untuk menerapkan model rumah aman berbasis hak secara konsisten. Korban yang hak dan kepentingannya tidak dilindungi atau dilayani akan terus lari dari rumah aman. Terlepas dari apakah rumah aman itu dianggap 'terbuka', 'tertutup' atau 'setengah tertutup', rumah aman berbasis hak tidak boleh melanggar kebebasan bergerak atau kebebasan para korban. Mereka harus bisa meninggalkan rumah aman, jika mereka bisa melakukannya dengan aman.

*Beberapa perempuan dipindahkan ke fasilitas perawatan rumah, yang mirip rumah detensi. Di sini, pergerakan para penghuni dibatasi. Para perempuan menolak gagasan tinggal di sana karena mereka khawatir apakah mereka bisa meninggalkan fasilitas atau menghubungi keluarga mereka.*

*Banyak dari mereka adalah pencari nafkah keluarga dan keluarga mereka bergantung kepada mereka untuk kebutuhan dasar. Mereka mulai bertindak agresif terhadap staf karena tidak setuju untuk tinggal di sana. Mereka mengembangkan ketidakpercayaan terhadap pekerja sosial karena cara mereka diwawancarai atau diperlakukan oleh petugas berseragam di kantor polisi.*

*--- Pekerja Sosial dan Kepala Unit Gender dan Pembangunan dari divisi pelayanan dan pengelolaan layanan sosial dari Program Pantawid Pamilyang Pilipino, Lokakarya Konsultasi Nasional Filipina, 14 Desember 2021.*



Alasan ***bantuan*** mengasumsikan bahwa dukungan dan layanan seperti perawatan psikososial, bantuan hukum, dan pengembangan keterampilan bagi orang-orang yang diperdagangkan hanya tersedia dan paling baik diberikan dalam konteks rumah aman. Dalam pandangan beberapa penyedia layanan, pengaturan yang terkontrol seperti rumah aman dapat berfungsi sebagai tempat yang aman bagi korban perdagangan orang untuk sembuh dan pulih. Bagi mereka yang membutuhkan perawatan khusus, rumah aman dipandang sebagai tempat yang baik untuk mengakses layanan semacam itu; layanan yang mungkin tidak bisa diakses jika mereka tinggal di luar rumah aman. Akan tetapi, Thailand menantang alasan bantuan dengan rumah aman, baik yang dikelola pemerintah maupun LSM, yang menawarkan dukungan dan layanan kepada korban meskipun mereka tidak ingin tinggal di rumah aman. Ada penekanan pada penilaian risiko yang terperinci dan memastikan korban aman jika mereka memilih untuk tidak tinggal di rumah aman.

Alasan ***penuntutan*** mendapat legitimasi dalam fakta bahwa kehadiran saksi-korban secara fisik masih menjadi persyaratan dalam proses peradilan pidana di banyak negara ASEAN. Oleh karena itu, korban perdagangan orang ditempatkan di rumah aman selama proses hukum berlangsung, sehingga mereka bisa dipanggil kapan saja untuk memberikan bukti yang memberatkan terhadap pelakunya. Mereka juga dicegah untuk meninggalkan rumah aman karena mereka cenderung tidak ingin terus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan peradilan setelah mereka bersatu kembali dengan keluarga mereka. Para pemangku kepentingan telah menyebutkan kesulitan keuangan, perubahan lingkungan sosial dan pribadi, tekanan dari stigmatisasi, dan stres yang disebabkan trauma sebagai beberapa alasan yang menyebabkan korban melepaskan proses hukum.

Kelambatan proses peradilan pidana mengakibatkan banyak korban tetap dalam penjagaan, termasuk di dalam rumah aman. Pengadilan dapat memakan waktu bertahun-tahun tanpa jaminan hasil positif yang nyata bagi korban dan keluarga mereka. Menyadari hal ini, beberapa negara ASEAN telah mengambil langkah untuk memisahkan perlindungan korban dari kesediaan korban untuk terlibat dalam penuntutan. Filipina dan Thailand adalah contoh yang baik di mana korban tidak perlu tinggal di rumah aman selama proses penuntutan.

Seorang pemangku kepentingan Thailand berbagi bahwa sudah lama ada anggapan umum bahwa para korban akan melarikan diri dari penyelidikan dan proses jika bisa, sehingga para penegak hukum Thailand memilih agar saksi-korban ditempatkan di rumah aman.

Sejak itu Thailand telah memperbaiki sistem pengadilan untuk memungkinkan jaminan untuk dipertimbangkan dan diberikan kepada korban perdagangan orang. Di masa lalu, permintaan jaminan dilaporkan sulit untuk diperoleh. Dalam mencari solusi berkelanjutan, para pemangku kepentingan Thailand mendiskusikan kemungkinan bagi Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia (MSDHS), yang merupakan lembaga utama dalam membantu dan melindungi korban perdagangan orang, untuk mengakomodasi kemungkinan korban melarikan diri dari proses hukum dan pengadilan. Pendekatan seperti itu akan berarti bahwa korban tidak secara tidak disengaja dan secara tidak masuk akal ditempatkan di rumah aman untuk waktu yang lama, yang akhirnya mengurangi dorongan untuk mau bekerja sama dalam menuntut para pelaku dalam kasus apa pun.

### 3.4 Menuju rumah aman yang lebih inklusif

Laporan ASEAN-ACT 2018 mendapati bahwa praktik rumah aman di ASEAN sangat dipengaruhi gender.[21] Praktik rumah aman yang berlaku menggaungkan temuan ini, seperti terus berkurangnya fasilitas rumah aman untuk penyandang disabilitas, korban asing, dan mereka yang berbeda gender. Beberapa pemangku kepentingan melaporkan harus menolak dan mengirim pulang laki-laki korban Perdagangan orang karena tidak memiliki kapasitas untuk memberikan mereka tempat perlindungan. Di banyak rumah aman di kawasan ASEAN, penghuni perempuan terus dilatih dalam keterampilan rumah tangga seperti kerajinan tangan, menjahit, memasak, alih-alih di bidang yang lebih selaras dengan minat, bakat, atau keterampilan individu atau dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pembatasan kesempatan kejuruan di ranah domestik membuat program ini melemahkan alih-alih meningkatkan otonomi dan kemakmuran ekonomi masa depan perempuan dan gadis yang diperdagangkan.

Thailand mengambil pendekatan inklusif dalam hal melindungi korban perdagangan orang. Mengenali bahwa kelompok yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda tergantung pada gender dan usia, MSDHS menciptakan sembilan rumah aman – empat untuk perempuan dan anak perempuan, empat untuk laki-laki di atas 15 tahun dan satu untuk anak laki-laki di bawah usia 15 tahun. Kementerian ini bekerja sama dengan LSM untuk mengelola rumah aman mereka sendiri sebagai alternatif dari rumah aman yang dikelola negara, dan korban bebas memilih rumah aman yang mereka sukai. MSDHS juga memiliki rumah aman sementara di tingkat provinsi yang mampu menyediakan akomodasi sementara selama tiga hingga tujuh hari sebelum merujuk korban ke rumah aman yang lebih permanen.



Demikian pula, Philippine Interagency Council Against Trafficking (IACAT) telah meluncurkan Tahanan ng Inyong Pag-Asa atau Pusat TPPO pada bulan Desember 2020 – rumah aman IACAT pertama dan tempat pelayanan terpadu yang melayani korban perdagangan orang. Rumah aman ini berfungsi sebagai rumah aman sementara untuk korban perdagangan yang ditolong dan sampai saat ini, telah mendukung 24 perempuan, enam laki-laki, 14 anak perempuan dan 10 anak laki-laki.

Kementerian Perempuan, Keluarga, dan Pembangunan Masyarakat Malaysia telah menetapkan 10 fasilitas khusus untuk menampung korban perdagangan orang: delapan rumah aman yang dikelola pemerintah (lima untuk perempuan, dua untuk anak-anak, dan satu untuk laki-laki) dan dua rumah aman yang dikelola LSM untuk perempuan dan anak-anak.

Thailand telah mencari cara untuk memberikan perawatan dan perlindungan yang lebih baik untuk korban yang diidentifikasi sebagai LGBTQI (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex). Setelah berkonsultasi dengan komunitas LGBTQI, MSDHS telah memutuskan untuk tidak melanjutkan membuat fasilitas rumah aman di Provinsi Chiang Rai province untuk korban LGBTQI. Alih-alih, rumah aman yang sudah ada didorong/diwajibkan untuk menetapkan ruang aman dan pribadi untuk korban LGBTQI. Pada saat yang sama, semua pengelola rumah aman akan dilatih mengenai bagaimana memperlakukan korban LGBTQI dengan menggunakan modul yang sama yang dikembangkan di rumah aman Chiang Rai. Juru bicara dari MSDHS berkata bahwa langkah-langkah ini dimaksud untuk mendorong kaum LGBTQI untuk maju diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang.

Merawat anak korban perdagangan orang adalah tantangan yang dihadapi oleh semua pemangku kepentingan ASEAN di lokakarya konsultasi nasional. Tantangan ini sangat akut ketika menyangkut anak-anak yang mengalami trauma parah dan membutuhkan perawatan dan pengobatan khusus jangka panjang, serta anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan. Penyedia rumah aman menyuarakan rasa frustrasi mereka pada kurangnya staf yang berkualitas dan dukungan keuangan dalam merawat anak-anak ini. Pemangku kepentingan Filipina berbagi bahwa mereka berkonflik, apakah akan menunda anak di bawah umur meninggalkan rumah aman untuk perlindungan mereka sendiri atau membiarkan mereka mengambil keputusan sendiri, yaitu kembali ke bar dan mungkin diperkosa. Berdasarkan pengalaman mereka, perempuan dan anak perempuan yang telah 'ditolong' dari tempat hiburan biasanya kembali ke tempat kerja mereka begitu mereka meninggalkan rumah aman. Untuk menghindari hal ini, penyedia rumah aman dan pekerja sosial mencoba mencegah korban, terutama anak-anak, agar tidak terlalu cepat meninggalkan rumah aman dan memberi tahu mereka tentang pilihan yang mereka miliki dan layanan yang dapat mereka peroleh di rumah aman.

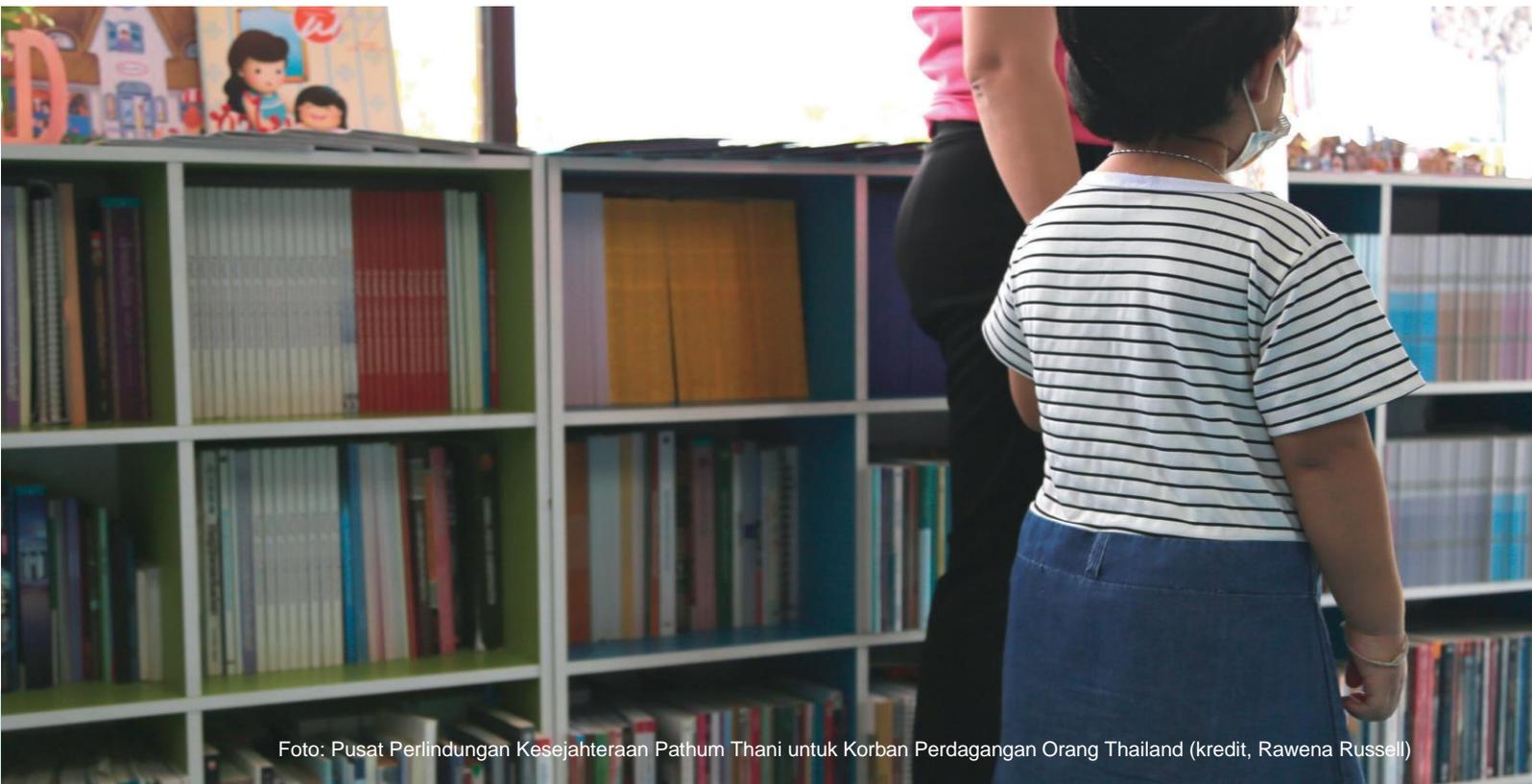


Foto: Pusat Perlindungan Kesejahteraan Pathum Thani untuk Korban Perdagangan Orang Thailand (kredit, Rawena Russell)

Misi Keadilan Internasional dan Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Filipina (DSWD) berkolaborasi untuk mengembangkan model pengasuhan bagi anak-anak korban pelecehan dan eksploitasi seksual daring (OSAEC). Filipina telah diidentifikasi sebagai negara sumber utama untuk OSAEC dan pandemi COVID-19 telah memperburuk tren ini. [22] Model pengasuhan ini berfokus pada korban yang sangat muda dan saudara kandung dari gender yang berbeda/campuran. Model ini mengatasi kekurangan fasilitas penampungan yang ada di Filipina yang mampu menampung kelompok gender campuran.

Berbasis di Chiang Mai, Family Connection Foundation[23] menjalankan panti asuhan untuk anak-anak rentan di Ban Sanrak. Praktik rumah adalah bahwa tidak lebih dari enam anak yang ditampung dalam satu rumah, dengan tidak lebih dari tiga

anak dalam setiap kamar. Staf rumah aman mengatur berbagai kegiatan untuk anak-anak seperti pergi ke bioskop. Yayasan ini berfokus untuk mendukung anak-anak yang telah dinilai sebagai yatim piatu sejati dan anak-anak yang ditelantarkan, dilecehkan dan diabaikan, dan tidak bisa kembali ke keluarga mereka. Pelatihan pengasuhan anak diberikan kepada staf yang bekerja membangun ikatan dengan anak-anak dalam 3-6 bulan pertama sejak mereka masuk ke rumah. Yayasan menekankan pada mendorong anak-anak untuk menghormati orang lain dan memiliki harga diri; menjadi warga negara yang bertanggung jawab; dan memiliki sikap positif terhadap hidup. Pendekatan yang berpusat pada anak diperoleh dalam pengembangan rencana individu setiap anak. Anak-anak secara aktif dilibatkan dalam perencanaan itu, dengan anak-anak yang lebih tua memutuskan untuk diri mereka sendiri apa/di mana mereka ingin belajar.

[20] Cordisco Tsai, L., Lim, V., Nhanh, C., & Namy, S. (2022). "Mereka Tidak Memperhatikan atau Tidak Mau Mendengar Ketika Kami Berbicara": Pengalaman Perempuan di Rumah Aman Khusus Perdagangan orang di Kamboja. *Affilia*, 37(1), 151–168.

[21] Marika McAdam (2018). Kebebasan bergerak bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang: Analisis hukum, kebijakan, dan praktik di Kawasan ASEAN. ASEAN-Australia Counter Trafficking.

[22] "Studi: Filipina adalah hotspot global untuk pelecehan anak secara daring". Associated Press. 21 Mei 2020. Lihat <https://abcnews.go.com/International/wireStory/study-philippines-global-hot-spot-online-child-abuse-70804205>

[23] Lihat <https://fcfthailand.org/live/portfolio/bansarnrak/>

[24] Informasi ini akurat pada tanggal 1 Juni 2021.

[25] Informasi ini akurat pada saat Lokakarya Konsultasi Nasional Filipina pada tanggal 14 Desember 2021.

[26] Cordisco Tsai, L., Lim, V., Nhanh, C., & Namy, S. (2022). "Mereka Tidak Memperhatikan atau Tidak Mau Mendengar Ketika Kami Berbicara": Pengalaman Perempuan di Rumah Aman Khusus Perdagangan orang di Kamboja. *Affilia*, 37(1), 151–168.

[27] Lihat ASEAN (2023). Panduan Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan ASEAN: Menjaga Hak Korban Perdagangan Orang. Jakarta: Sekretariat ASEAN.

## **3.5 Tantangan di luar rumah aman tertutup dan kebebasan bergerak korban perdagangan orang**

Lokakarya konsultasi nasional membahas berbagai tantangan terkait perawatan dan perlindungan korban. Sebelumnya, dokumen ini telah menjelaskan kurangnya rumah aman dan layanan pendukung untuk korban laki-laki dan kelompok rentan lainnya sebagai celah serius dalam ruang kontra-perdagangan orang dan tantangan dalam mengelola isu sensitif tentang bagaimana korban perdagangan orang harus/bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka. Bagian ini menguraikan tantangan lain dalam praktik rumah aman, termasuk yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, yang dialami oleh para pemangku kepentingan ASEAN.

### ***3.5.1 Gangguan yang disebabkan oleh virus corona***

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada akses tepat waktu para korban ke rumah aman dan layanan dukungan lain. Terlepas dari pembatasan mobilitas dan peningkatan beban kerja terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan dan protokol baru, pengelola rumah aman di ASEAN mengangkat beberapa tantangan khusus yang memengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan perawatan dan perlindungan berkualitas kepada korban perdagangan orang.

Salah satu tantangan yang diangkat adalah perlunya pusat transit, yang dimaksudkan sebagai rumah aman bagi korban untuk dites virus corona. Kurangnya sumber daya keuangan oleh pemerintah disebut sebagai alasan kenapa pusat transit tidak memenuhi kebutuhan. Pertanyaan mengenai siapa yang membayar biaya tes COVID termasuk Tes Rapid Antigen bagi korban perdagangan orang diangkat pada beberapa lokakarya konsultasi nasional. Seorang pemangku kepentingan Indonesia menyebutkan bahwa ketidakjelasan seputar masalah ini telah menyebabkan beberapa korban berada di pusat transit selama berbulan-bulan.

Langkah-langkah untuk mengurangi kepadatan di dalam fasilitas rumah aman berarti bahwa banyak rumah aman kapasitasnya kini berkurang. Beberapa rumah aman juga mengutip tantangan penggalangan dana yang ditimbulkan oleh pandemi karena pemerintah dan donor mengalihkan dana ke inisiatif kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah aman LSM harus mengandalkan lebih banyak sumbangan pribadi untuk biaya pemeliharaan fasilitas dan layanan. Hal ini juga mengakibatkan tekanan tambahan bagi penyedia layanan.



Masalah lain menyangkut status vaksinasi korban perdagangan orang. Vaksinasi tidak wajib di sebagian besar negara ASEAN kecuali Indonesia, yang mengumumkan vaksinasi wajib untuk semua warga negara yang memenuhi syarat pada bulan Februari 2021.[24] Pengelola rumah aman kesulitan menemukan cara untuk mengelola penghuni (lama dan baru) yang menolak divaksinasi melawan virus corona. Meskipun undang-undang mengamanatkannya, pengelola rumah aman membutuhkan panduan tentang cara meyakinkan warga yang menolak gagasan vaksinasi, karena alasan pribadi dan budaya, untuk divaksinasi.

Di Filipina, Pusat Tanglaw Buhay mengatakan bahwa COVID-19 telah mempengaruhi anak-anak yang baru dirujuk karena mereka harus menjalani tes PCR untuk mendapatkan hasil negatif sebelum masuk ke Pusat. Persyaratan ini telah menciptakan biaya tambahan untuk operasi Pusat. Unit Pemerintah Lokal di Filipina tidak bisa memberikan swabbing gratis untuk semua orang, oleh karena itu beberapa persyaratan pengujian telah menjadi tanggung jawab rumah aman. Pergeseran ke pembelajaran modular baru berbasis daring untuk anak-anak berarti bahwa staf rumah aman harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk melatih anak-anak yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat dan mengikuti cara pembelajaran baru ini. Selain itu, koneksi internet yang tidak stabil juga mengganggu cara belajar anak. Pusat ini juga melaporkan lambatnya kemajuan dalam kasus hukum yang melibatkan anak-anak sebagai akibat pandemi – hanya sembilan dari 64 kasus yang diajukan ke pengadilan yang sedang berlangsung – akibatnya menunda pemulihan segera bagi beberapa anak.[25]

### **3.5.2 Rumah aman dan penyedia layanan kekurangan sumber daya**

Kurangnya sumber daya secara umum dan kurangnya pekerja sosial dan psikolog yang terlatih untuk merawat dan mendukung korban perdagangan orang menimbulkan frustrasi yang mendalam bagi sebagian besar pemangku kepentingan di ASEAN. Penyedia layanan mungkin tidak memiliki pelatihan dasar untuk bekerja dengan orang yang mengalami trauma. Memastikan ketersediaan staf berkualitas dan memperkuat kapasitas penyedia layanan menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan. Transfer pengetahuan dan pembangunan kapasitas untuk staf rumah aman, pekerja sosial, konselor, pengelola kasus dan penyedia layanan lainnya sangat dibutuhkan. Namun, hal ini sangat terkendala oleh kurangnya anggaran untuk instansi terkait dan rumah aman dalam memenuhi mandat mereka – masalah yang diperburuk oleh krisis pandemi yang sedang berlangsung.

*Kami hanya memiliki dua rumah aman – satu di Hanoi dan yang lain di Can Tho.*

*Ini tidak cukup. Kami ingin memperluas layanan kami untuk mencakup seluruh Vietnam.*

*--- Peace House, Lokakarya Konsultasi Nasional Vietnam, 1 April 2022.*

*Kami hanya memiliki satu rumah aman pemerintah untuk semua jenis korban. Tidaklah mudah mengoperasikan rumah aman dengan anggaran dan sumber daya kecil yang kami miliki.*

*--- Persatuan Perempuan Laos, Lokakarya Konsultasi Nasional, 28 Februari 2022.*

*Saya lelah berbicara mengenai rumah aman. Anggarannya hanya 16 juta rupiah per tahun, yang tidak cukup, dan kami menerima makin banyak kasus TPPPO. Kami dapat menampung mereka, kami dapat memberi mereka makan, tetapi kami tidak bisa membicarakan kualitasnya. Anggaran makan untuk satu anak dibatasi hanya untuk dua minggu. Ini kendala kami.*

*--- Pusat Layanan Terintegrasi untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak-Anak (P2TP2A), Lokakarya Konsultasi Nasional Indonesia, 28 Januari 2022.*

### **3.5.3 Kualitas dan keamanan rumah aman yang tidak merata**

Kualitas dan keamanan rumah aman yang tidak merata menjadi perhatian beberapa pemangku kepentingan. Di beberapa rumah aman, tidak ada protokol keamanan, bangunannya tidak cukup dijaga, atau lokasinya tidak cukup aman.

Situasi ini diperparah dengan kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan penghuni rumah aman – polisi, lembaga pemerintah terkait, atau pengelola rumah aman.

Beberapa pemangku kepentingan berbagi bahwa telah terjadi insiden pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap penghuni rumah aman. Insiden semacam itu tidak selalu dilaporkan atau diperlakukan sebagai masalah yang perlu ditangani. Mereka menyatakan perlunya situasi ini diungkap, termasuk menjadi perhatian jaksa dan hakim, sehingga mereka merasa terpanggil untuk membantu percepatan kasus TPPO. Akibatnya, durasi tinggal korban di rumah aman tidak perlu diperpanjang jika tidak perlu.



### **3.5.4 Merawat korban dengan kebutuhan kompleks**

Merawat korban yang mengalami stres atau gangguan mental merupakan tantangan besar bagi para praktisi. Para pemangku kepentingan melaporkan bahwa "korban berteriak sepanjang malam" karena mereka depresi. Beberapa anak kecil mengalami mimpi buruk berulang dan berjalan dalam tidur akibat pengalaman traumatis mereka. Oleh karena itu, rumah aman berada di bawah tekanan untuk menugaskan pekerja sosial siaga 24/7, yang tidak selalu memungkinkan.

Tantangan lain berkaitan dengan penanganan korban warga negara asing dan mereka yang tidak memiliki dokumen identitas. Penyedia rumah aman tidak bisa mengkonfirmasi alamat para korban ini dan menelusuri keluarga mereka dengan sukses. Akibatnya, beberapa dari mereka berakhir tinggal di rumah aman untuk waktu yang lama, dengan sedikit harapan untuk dipulangkan. Penyedia rumah aman juga harus bernegosiasi dengan petugas imigrasi tentang deportasi atau kriminalisasi korban asing yang telah memasuki negara secara ilegal.

*Saat ini, kami membantu korban dari Kalimantan. Kami tidak bisa memulangkan korban karena kami tidak bisa memverifikasi identitasnya. Dia tidak memiliki nomor kartu identitas karena dia masih di bawah umur. Kami tidak bisa memberinya dukungan pendidikan karena dinas pendidikan Yogyakarta hanya memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak warga Yogyakarta. Jadi, kami harus berkomunikasi dengan Dinas Sosial di Kalimantan.*

*---Rifka Annisa (NGO), Lokakarya Konsultasi Nasional Indonesia, 28 Januari 2022.*



### **3.5.5 Koordinasi yang buruk antar lembaga**

Merawat korban perdagangan orang adalah proses yang rumit yang membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi seperti penegak hukum, urusan sosial, lembaga perlindungan saksi, serikat perempuan, LSM, dan organisasi berbasis masyarakat. Komunikasi dan koordinasi yang buruk antara penyedia layanan terkait dapat berdampak buruk pada pemulihan korban.

Korban dapat menjadi korban kembali jika mereka harus diwawancarai atau atau ditanya pertanyaan yang sama beberapa kali oleh beberapa penyedia layanan. Selain itu, penundaan yang tidak perlu dalam proses rujukan dapat mengurangi kepercayaan korban dalam proses pendampingan, atau lebih buruk menghambat reintegrasi mereka kembali ke komunitas lokal mereka.

*Ada kebutuhan untuk meningkatkan kerja sama antarlembaga antara penjaga perbatasan dan Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Cacat, dan Urusan Sosial (MOLISA). Kami juga perlu meningkatkan penyelamatan korban dan rujukan antara MOLISA dan Peace House. Meskipun Vietnam memiliki kerjasama multi lembaga yang baik, Persatuan Perempuan Vietnam tidak menyebutkan secara resmi prosedur operasi standar yang dikeluarkan oleh MOLISA dalam penyelamatan dan rujukan orang-orang yang diperdagangkan.*

*---Persatuan Perempuan Vietnam, Lokakarya Konsultasi Nasional Vietnam, 1 April 2022.*

*Kami berusaha proaktif agar kami dapat memberikan dukungan tepat waktu bagi korban. Misalnya, daripada menunggu dokumen resmi, kami menghubungi otoritas terkait di tingkat lokal atau pusat dan meminta kerja sama mereka.*

*---Peace House, Lokakarya Konsultasi Nasional Vietnam, 1 April 2022.*

## **3.6 Di Luar shelter tertutup: Menciptakan lingkungan yang aman dan memberdayakan bagi semua**

Wacana tentang kebebasan bergerak bagi korban perdagangan orang akan terus menarik berbagai pandangan. Melindungi korban membutuhkan keseimbangan yang hati-hati untuk dicapai antara hak-hak korban dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya yang kadang-kadang bersaing untuk untuk membawa pelaku perdagangan orang ke pengadilan dan untuk mengelola migrasi secara efektif. Seperti terungkap dalam lokakarya konsultasi nasional, para pemangku kepentingan ASEAN dari sektor pemerintah maupun non pemerintah memiliki interpretasi yang berbeda tentang kebebasan bergerak korban perdagangan orang dan apa artinya dalam praktik. Krisis pandemi juga mengungkap banyak kendala yang dihadapi penyedia rumah aman pra-pandemi, yang memburuk dalam menghadapi anggaran yang menyusut dan sumber daya yang semakin ketat.

Di dalam ASEAN, ada konsensus yang muncul untuk bergerak menuju pendekatan berbasis hak yang berpusat pada korban dalam perlindungan korban perdagangan orang. Para praktisi tampaknya menetapkan parameter yang jelas dan mengembangkan inisiatif kreatif untuk mempromosikan lingkungan yang aman dan memberdayakan baik bagi penghuni maupun staf rumah aman. Terlepas dari banyaknya tantangan yang dihadapi penyedia rumah aman dan petugas garis depan lainnya, ada minat dan komitmen yang tulus untuk berinovasi dan menguji coba pendekatan baru dalam perawatan korban. Di bawah adalah beberapa praktik baik yang dibagikan dalam lokakarya konsultasi nasional.

### ***3.6.1 Membangun kepercayaan dan keyakinan***

Membangun kepercayaan dengan korban perdagangan orang adalah langkah awal yang penting dan tujuan yang dimiliki oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini sangat menonjol dalam inisiatif kontra perdagangan orang, mengingat bahwa pengalaman perdagangan orang seringkali berawal dari manipulasi dan pengkhianatan yang mendalam.[26] Para pemangku kepentingan yang aktif terlibat secara langsung dalam perawatan korban menekankan bahwa memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada korban merupakan komponen penting dari proses membangun kepercayaan ini. Perhatian harus diberikan pada cara korban diperlakukan dan diajak bicara.



*Korban perlu tahu bahwa rumah aman kami adalah tempat perlindungan bukan tempat detensi, sehingga mereka memiliki kepercayaan untuk tinggal di rumah aman. Kami tidak bisa menjamin lamanya masa tinggal mereka, tetapi kami akan mengabarkan korban tentang perkembangan kasus hukum mereka sehingga mereka dapat diyakinkan kembali.*

*--- MSDHS, Lokakarya Konsultasi Nasional Thailand, 13 Desember 2022.*

*Kami berhati-hati dengan berbahasa yang hangat dan informal ketika berbicara dengan korban untuk menciptakan lingkungan seperti keluarga bagi mereka. Pendatang baru akan menerima orientasi dan kebutuhan mereka akan didiskusikan untuk memastikan dukungan yang tepat diberikan. Kami menghormati keputusan mereka.*

*--- Village Foundation International (NGO), Lokakarya Konsultasi Nasional PDR Laos, 28 Februari 2022.*

*Kami bertanya kepada korban apakah mereka khawatir tinggal di rumah aman. Jika kami mengidentifikasi bahwa hidup dan keselamatan mereka terancam, maka kami akan mengungkapkan informasi itu kepada mereka, kami akan menyampaikan pro dan kontra tinggal di rumah aman kami. Tapi jika tidak demikian, jika mereka tidak terancam, tapi ingin tinggal di rumah aman kami, kami tetap bisa mengakomodasi mereka.*

*--- Rumah Faye (LSM), Lokakarya Konsultasi Nasional Indonesia, 28 Januari 2022.*

### **3.6.2 Mengadopsi pendekatan kasus per kasus**

Pemangku kepentingan di lokakarya konsultasi nasional mengakui keadaan unik dari setiap korban, dengan penyedia layanan menerapkan tingkat fleksibilitas yang tinggi ketika mempertimbangkan pengaturan rumah aman terbaik untuk setiap individu. Di Thailand, penyedia rumah aman mempertimbangkan berbagai faktor seperti latar belakang budaya dan agama korban, terutama kebutuhan finansial korban untuk mendukung keluarga mereka, jenis keterampilan dan pengetahuan yang ingin diperoleh korban, dll. Dengan demikian, penyedia rumah aman atau pengelola kasus wajib mengadakan Rencana Pengembangan untuk setiap individu untuk memahami kebutuhan khusus mereka dan menyusun rencana bantuan yang paling efektif. Korban Thailand yang tidak ingin tinggal di rumah aman diizinkan kembali ke keluarga mereka dengan penyedia layanan mendukung mereka di rumah.

*Model Shelter Bahagia Thailand memungkinkan korban dewasa untuk pindah dan mencari pekerjaan setelah masa pemulihan sehingga mereka tidak merasa terjebak di dalam rumah aman. Korban bebas menyumbangkan ide untuk menu minggu ini, memasak makanan kampung halaman mereka, memutuskan untuk menerima pelatihan kejuruan, dan memilih waktu istirahat. Rumah aman harus seperti rumah. Kami harus aktif mendengarkan korban. Jika kami pikir keputusan atau keinginan mereka dapat merugikan mereka, kami harus menjelaskannya kepada mereka.*

*---MSDHS, Lokakarya Konsultasi Nasional Thailand, 13 Desember 2022.*

Sebuah LSM di Kamboja mencoba menyesuaikan lama tinggal dan program bantuan di rumah aman mereka tergantung pada kebutuhan dan keadaan individu. Rumah aman itu mengadopsi model rumah transisi, dengan fokus pada hubungan terapeutik dan mengintegrasikan pengembangan klien dalam kegiatan harian. Korban dapat memilih untuk tinggal jangka pendek hanya selama satu hingga tiga minggu atau tinggal lebih lama untuk menerima pelatihan kejuruan atau bekerja. Pekerjaan atau pelatihan kejuruan untuk penghuni jangka panjang antara tiga hingga enam bulan dan selalu diadakan di luar rumah aman melalui kemitraan LSM dengan pemberi kerja dan program pelatihan. Menyadari bahwa dukungan dan manajemen klien adalah tugas yang sangat terampil, mereka mempekerjakan staf berkualifikasi yang bertanggung jawab untuk perawatan korban langsung. Mereka memastikan bahwa staf ini diawasi dengan baik, baik dalam hal pengawasan klinis / pembekalan (baik internal dan eksternal, secara individu dan kelompok) dan dalam hal pengawasan kerja sehingga ada pengelolaan lingkungan rumah yang baik.

Demikian pula, sebuah LSM di PDR Laos mengadopsi pendekatan kasus per kasus ketika menyangkut menampung dan mendukung korban perdagangan orang.

*Lama masa tinggal mereka tidak tetap - mereka dapat tinggal bersama kami untuk jangka pendek, menengah atau panjang tergantung pada keadaan mereka dan begitu keamanan mereka kembali dengan keluarga terjamin. Pekerja sosial kami akan terus menindaklanjuti korban untuk memberikan dukungan setelah mereka kembali ke rumah. Kebijakan utama kami adalah bersikap fleksibel berdasarkan status korban dan pengalaman mereka menjadi korban.*

*---Village Focus International (LSM),  
Lokakarya Konsultasi Nasional PDR Laos,  
28 Februari 2022.*

Di Malaysia, Kementerian Perempuan, Keluarga, dan Pembangunan Keluarga (MWFCD) telah mengambil langkah untuk mendorong kebebasan pergerakan korban perdagangan orang melalui pendekatan bercabang dua. Rumah aman didorong untuk mengajukan izin untuk bergerak bebas atas nama penghuninya sedini mungkin selama perintah Perlindungan Sementara. Proses pemberian izin tersebut telah dipercepat oleh otoritas terkait mengingat pentingnya meningkatkan perawatan dan perlindungan di Malaysia. Persetujuan itu juga tunduk pada penilaian risiko yang komprehensif yang terdiri dari aspek keamanan, kesehatan dan psikologis. Pada saat yang sama, setiap rumah aman memiliki keleluasaan untuk memutuskan cara terbaik agar para korban dapat bergerak bebas tanpa membahayakan keselamatan mereka. Sebagian besar korban lebih suka didampingi seseorang saat meninggalkan rumah aman karena mereka merasa lebih aman dengan cara ini. Hal ini terutama terjadi pada korban warga negara asing yang tidak mengenal negara atau lingkungan mereka.

### **3.6.3 Mempromosikan penggunaan perawatan rumahan berbasis komunitas**

Penerapan perawatan rumahan berbasis komunitas di luar rumah aman atau institusi formal diakui sebagai praktik baik oleh banyak pemangku kepentingan. Perawatan seperti ini terlihat sebagai pendekatan yang lebih baik dalam mempromosikan pemulihan dan rehabilitasi jangka panjang. Selain itu, para pemangku kepentingan sudah melakukan upaya untuk menyatukan kembali para korban dengan keluarga mereka, jika aman dilakukan dan jika keluarga siap untuk menerima dan mendukung mereka. Terlebih lagi jika menyangkut anak korban perdagangan orang.

*Jika korban tidak ingin berada dalam perlindungan dan tinggal di pusat perawatan, kami memberi mereka pilihan. Kami juga mendapatkan penilaian kemampuan orang tua atau keluarga di lapangan dari petugas kesejahteraan sosial setempat untuk memeriksa kesiapan dan kesiagaan korban untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Dalam kasus ini, layanan akan diberikan kepada mereka dalam pengaturan berbasis komunitas.*

*--- DSWD, Lokakarya Konsultasi Nasional Filipina, 14 Desember 2021.*





*Kami harus beralih ke layanan berbasis komunitas atau perawatan berbasis keluarga. Awalnya, korban dirawat di rumah aman kami. Biasanya kami menghubungi keluarga mereka dan meminta mereka membantu kami. Kami tidak ingin korban diganggu oleh masyarakat setempat ketika mereka kembali ke keluarga mereka. Kami harus memperkuat mereka, kehidupan mereka, kemauan mereka, sehingga mereka mampu untuk maju.*

*--- Kementerian Sosial, Lokakarya Konsultasi Nasional Indonesia, 28 Januari 2022.*

*Di mana pun sesuai, perawatan rumahan berbasis rumah aman harus bersifat jangka pendek. Jika klien ingin tinggal lebih lama untuk pelatihan kejuruan atau penempatan kerja, kami menggunakan mitra eksternal dan mempertimbangkan kemungkinan menyewa kamar di dekat lokasi kerja untuk menghindari tinggal di rumah aman yang tidak perlu.*

*--- Ratanak International, Lokakarya Konsultasi Nasional Kamboja, 3 Desember 2021.*

### **3.6.4 Fokus pada pemulihan dan reintegrasi**

Penampungan korban bukanlah tujuan akhir, tapi sebagai bagian dari rangkaian perlindungan dan perawatan bagi korban perdagangan orang. Para pemangku kepentingan menyoroti pentingnya mendukung pemulihan korban dan mempersiapkan reintegrasi mereka kembali ke masyarakat.

*Program Pemulihan dan Reintegrasi Korban Perdagangan Orang (RRPTP) difasilitasi melalui manajemen kasus yang terintegrasi dan responsif gender, di mana pekerja sosial berlisensi menganalisis masalah dan kebutuhan korban perdagangan orang dan keluarga mereka. Pekerja sosial kami mengenali bias gender dan memanfaatkan perawatan berdasarkan trauma dalam memberdayakan korban perdagangan orang. Mereka mengidentifikasi dan menilai konflik dalam keluarga dan membantu korban memulihkan hubungan baik dengan keluarga mereka dan masyarakat. Setelah reintegrasi berhasil, harapan kami adalah para penyintas perdagangan orang dapat melanjutkan ke tahap ketiga, yaitu dapat mencukupi dirinya sendiri.*

--- DSWD, Lokakarya Konsultasi Nasional Filipina, 14 Desember 2021.

*Di bawah Undang-Undang Anti Perdagangan Orang Thailand, kami telah menyiapkan dana anti TPPO yang bertujuan untuk memberikan restitusi kepada korban, tapi bisa digunakan untuk mendukung pengeluaran harian, perawatan medis, pendidikan berkelanjutan atau pelatihan kejuruan. Misalnya, jika korban ingin berlatih menjadi barista dan membuat kopi, menjadi juru masak dan belajar di Akademi Kuliner, mereka bisa meminta bantuan keuangan. Banyak korban ingin belajar bahasa Inggris agar bisa bekerja di luar negeri secara sah. Dana ini dapat memberi mereka sejumlah modal untuk kehidupan baru. Uang ini tersedia untuk warga negara Thailand dan non-Thailand, dan tidak bersyarat. Namun, jika mereka tidak dapat mengakses dana ini, kami juga bisa menghubungi LSM kami dan mitra lain untuk meminta dukungan.*

--- MSDHS, Lokakarya Konsultasi Nasional Thailand, 13 Desember 2022.

*Beberapa penghuni rumah aman tidak dapat menemukan pekerjaan eksternal, jadi yang kami lakukan adalah menciptakan peran dalam rumah aman untuk mereka, seperti pemimpin rumah aman, asisten dapur, koordinator binatu, pesuruh, atau mengikuti penghuni lain untuk janji temu. Gaji token diberikan kepada mereka untuk membantu meringankan kecemasan finansial mereka. Sebagian besar penghuni adalah pencari nafkah tunggal dan ada banyak orang di rumah yang mengandalkan mereka untuk penghasilan. Dan seringkali, kami mendengar keluarga menelepon mereka bukan untuk bertanya "apa kabar", tapi bertanya "kapan akan mengirim uang kembali".*

--- Presentasi oleh HOME Singapura di Lokakarya Konsultasi Nasional Filipina, 14 Desember 2021.



### **3.6.5 Mempromosikan pendekatan multi-disiplin terhadap dukungan korban**

Mengambil pendekatan multi-disiplin memastikan bahwa ada koordinasi yang optimal di antara lembaga yang berbeda dan antara tingkat nasional dan lokal, dan yang lebih penting, berbagai kebutuhan korban terpenuhi. Jika kemitraan yang kuat telah dibangun, hasil bagi penyedia layanan dan korban cenderung sangat positif.

*Kami bekerja sebagai tim multi-disiplin, tidak hanya di antara VFI, Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial atau Kementerian Pendidikan dan Olahraga, tetapi kami juga bekerjasama dengan Persatuan Perempuan Laos tingkat provinsi dalam konseling dan pelatihan kejuruan. Organisasi kesehatan dan medis adalah mitra penting kami. Kami juga bekerja dengan para pengacara dan polisi anti TPPO dalam proses kasus, investigasi, atau penelusuran keluarga.*

*---Village Focus International (NGO), Lokakarya Konsultasi Nasional PDR Laos, 28 Februari 2022.*

*Kami menginformasikan korban mengenai LSM yang berpotensi membantu mereka dalam jangka panjang, juga lembaga pemerintah yang mungkin bisa membantu mereka jika mereka kembali ke rumah. Kami berbagi informasi kasus mereka dengan lembaga yang bertanggung jawab sehingga lembaga ini siap untuk mendukung korban. Beberapa LSM memiliki ahli dalam proses peradilan pidana sehingga dapat mendukung proses litigasi. Terserah para korban jika mereka ingin berpartisipasi dan mengizinkan LSM untuk bekerja dengan mereka.*

*---MSDHS, Lokakarya Konsultasi Nasional Thailand, 13 Desember 2022.*

### **3.6.6 Beradaptasi pada situasi krisis dan kemanusiaan**

Pandemi COVID-19 memaksa pemangku kepentingan sektor pemerintah dan non-pemerintah untuk beradaptasi dengan krisis yang berkembang dan berinovasi dalam perawatan dan perlindungan korban.

Kerja sama yang erat di antara lembaga-lembaga terkait tampaknya menjadi faktor utama keberhasilan beberapa inisiatif ini.

*Selama pandemi, kami bekerja sama dengan Kementerian Sosial di tingkat lokal untuk merujuk klien yang ingin kembali ke komunitasnya. Ini memberi pilihan kepada klien, meskipun mereka yang tinggal di daerah yang aksesnya lebih sulit karena situasi COVID saat itu. Kami juga mengembangkan rencana perawatan yang sangat individual untuk setiap klien, memastikan bahwa dukungan diberikan dalam skala yang lebih kecil atau satu per satu. Ini penting untuk kesejahteraan emosional dan mental klien karena mobilitas mereka telah dibatasi karena pembatasan kegiatan kerja atau pelatihan mereka yang biasa.*

*--- Rattanak International, Lokakarya Konsultasi Nasional Kamboya, 3 Desember 2021.*



*Selama COVID-19, Pusat Transit Poipet memiliki kerja sama yang baik dengan otoritas lokal dan pusat karantina negara di provinsi tersebut untuk memindahkan migran yang kembali dari Thailand ke pusat karantina. Identifikasi korban tidak dilakukan di pusat PTC karena COVID-19. Identifikasi korban dilakukan setelah migran yang kembali meninggalkan pusat karantina setelah 14 hari dan ketika mereka tiba di komunitas mereka. Korban diidentifikasi oleh LSM lokal dan provinsi & distrik MOSVY.*

*---Pengelola Pusat Transit Poipet, Kementerian Sosial, Rehabilitasi Veteran dan Pemuda, Lokakarya Konsultasi Nasional Kamboja, 3 Desember 2021.*

*Selama pandemi COVID-19, kami beradaptasi pada situasi itu dengan cepat, dan [membuat] panduan berdasarkan protokol kesehatan, memprioritaskan layanan daring dan hanya melakukan konsultasi tatap muka saat mendesak. Rancangan rumah aman diubah sesuai standar protokol kesehatan dan dokumen khusus untuk layanan kami selama pandemi.*

*--- Rifka Annisa (NGO), Lokakarya Konsultasi Nasional Indonesia, 28 Januari 2022.*

*Kementerian Sosial menyiapkan Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) Tanjung Pinang, RPTC Bambu Apus, and 41 pusat rehabilitasi sosial untuk memulangkan 7,300 TKI bermasalah dari Malaysia pada bulan Juni-Juli 2021. Selain berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan gugus tugas lain, termasuk pemerintah daerah dan Tim Gugus Tugas COVID-19, untuk menyusun rencana pemulangan TKI tersebut melalui pintu masuk Tanjung Pinang dan Pontianak.*

*--- Kementerian Sosial, Lokakarya Konsultasi Nasional Indonesia, 28 Januari 2022.*

*Pada bulan April 2020, DSWD mengeluarkan panduan dan catatan kepada semua kepala pusat kami untuk mengambil tindakan pencegahan di rumah aman DSWD dan LSM untuk memastikan bahwa semua rumah aman siap untuk menanggapi COVID-19 dan masalah kesehatan apa pun.*

*--- DSWD, Lokakarya Konsultasi Nasional Filipina, 14 Desember 2021.*

# BAGIAN 4 : REKOMENDASI

Menyediakan layanan berbasis rumah aman bagi penyintas perdagangan orang dan eksploitasi seksual merupakan pekerjaan yang rumit dan sulit. Lokakarya konsultasi nasional mengusulkan serangkaian rekomendasi sebagai tanggapan atas diskusi tentang praktik rumah aman di ASEAN. Sementara beberapa rekomendasi menangani masalah kebebasan bergerak korban perdagangan orang secara langsung, yang lain membahas tantangan yang lebih luas dari perawatan dan perlindungan korban yang telah dijelaskan dalam dokumen ini. ACWC ingin merekomendasikan rekomendasi-rekomendasi berikut untuk melindungi para korban perdagangan orang. Beberapa rekomendasi ini diambil dari Laporan ASEAN-ACT 2018.

## ***Untuk praktisi***

1. Menerapkan pendekatan Tidak Membahayakan dalam menyediakan rumah aman dan pendampingan kepada korban perdagangan orang.[27] Hal ini mengharuskan penyedia layanan berhati-hati untuk tidak menciptakan kembali aspek pengalaman traumatis para penyintas sebelumnya, mengadopsi praktik berdasarkan informasi trauma, dan terus menghormati kebutuhan akan keamanan nasional.
2. Mempromosikan model rumah aman berbasis hak dan berpusat pada korban yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pemberian perawatan dan layanan dengan cara yang penuh kasih sayang dan tidak menghakimi. Pendekatan semacam itu mendukung korban untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tentang keselamatan, pemulihan dan reintegrasi. Pendekatan itu membutuhkan penyedia layanan untuk melibatkan korban secara komprehensif dan jujur, dan untuk mengembangkan rencana perawatan yang sangat individu.
3. Pastikan bahwa rumah aman dan layanan lainnya disediakan atas dasar persetujuan sukarela dan berdasarkan informasi. Korban harus benar-benar memahami hak dan kewajiban mereka sebelum memasuki rumah aman. Staf rumah aman harus meluangkan waktu untuk menjelaskan peraturan rumah aman kepada korban, dengan bantuan seorang juru bahasa jika perlu, dan memastikan bahwa korban nyaman dengan aturan itu. Persetujuan harus diperoleh secara rutin dan korban harus diizinkan untuk meninggalkan rumah aman jika aman untuk dilakukan.



4. Memfasilitasi peluang yang aman dan terstruktur bagi para korban untuk berhubungan dengan keluarga mereka, dengan dukungan dari staf. Korban harus memiliki kebebasan untuk bertemu dengan keluarga dan teman, kecuali bila keselamatan dan kesejahteraan korban, penghuni lain, atau staf rumah aman dapat dikompromikan. Membangun komunikasi yang jelas dan jujur dengan keluarga korban, termasuk mengatur ekspektasi mereka mengenai kapan mereka bisa bertemu atau bicara dengan korban. Ini akan membantu dalam memperoleh pengertian keluarga ketika korban merasa tidak siap untuk bertemu dengan mereka.

5. Memastikan bahwa fasad dan interior rumah aman tidak menyerupai penjara. Mempromosikan lingkungan yang hangat dan ramah di dalam rumah aman. Rumah aman sebaiknya berada di komunitas dan tidak jauh dari peradaban. Rumah aman tidak boleh memiliki papan tanda yang jelas dan lokasinya harus dirahasiakan untuk melindungi keselamatan dan privasi staf dan penghuni Rumah aman.

6. Untuk memastikan bantuan yang efektif dan tepat, sangat penting untuk menawarkan dukungan individual yang mempertimbangkan kebutuhan dan perhatian khusus setiap orang, kekuatan spesifiknya, serta sumber daya dan aspirasi pribadinya. Misalnya, pelatihan kejuruan harus membekali para korban dengan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang sah setelah meninggalkan rumah aman. Ini berarti bahwa penyedia layanan harus fleksibel dan siap untuk menangani kebutuhan dan situasi yang berbeda, melalui pembentukan sistem rujukan yang luas dan menjaga hubungan erat dengan penyedia layanan lainnya, lembaga pemerintah daerah dan sektor swasta.

7. Pastikan bahwa semua rumah aman memiliki kode etik yang dipahami oleh semua staf dan penghuni, yang berisi instruksi khusus tentang apa yang harus dilakukan staf dan siapa yang harus diberi tahu jika terjadi ancaman aktual atau potensial terhadap keamanan korban dan/atau staf timbul, atau ketika korban meminta atau menyatakan keinginan untuk pergi.

8. Memperkuat kapasitas staf rumah aman untuk menginformasikan dan memberdayakan korban secara efektif untuk membuat keputusan tentang perlindungan, bantuan, pemulihan, dan (re)integrasi mereka, khususnya untuk memastikan bahwa staf tidak memaksa korban untuk setuju menerima layanan.

9. Menetapkan mekanisme di mana para korban selalu mengetahui perkembangan dan status kasus mereka, dan memiliki sarana di mana mereka dapat meminta informasi tentang perkembangan dan statusnya setiap saat.

10. Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan yang dihadapi korban perdagangan orang dalam mengakses layanan perlindungan dan bantuan di luar sistem rumah aman, sebagai dasar untuk mengembangkan model rumah aman dan bantuan yang lebih terbuka dan berbasis komunitas.

### ***Untuk Pembuat kebijakan***

11. Memastikan bahwa rumah aman dan perlindungan dipisahkan dari keinginan korban untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pidana. Jika hal ini terekam dengan jelas dalam undang-undang atau kebijakan dalam negeri, pastikan hal ini diketahui dengan jelas oleh korban, penegak hukum, dan penyedia layanan. Penting untuk tidak berasumsi bahwa setiap praktisi memiliki pengetahuan penuh tentang undang-undang dan kebijakan.
12. Meninjau kerangka hukum tentang penyediaan tempat tinggal untuk mengizinkan saksi-korban yang terlibat dalam proses hukum untuk tinggal di luar rumah aman yang dikelola negara. Jika mereka tidak bisa hidup dengan keluarga, pengaturan hidup alternatif dengan majikan mereka atau organisasi berbasis komunitas atau LSM, harus dibuat.
13. Mempromosikan pendekatan kasus per kasus ketika mempertimbangkan rumah aman dan perawatan/perlindungan terbaik untuk setiap individu. Ini merupakan praktik terbaik yang sudah diterapkan di beberapa negara anggota ASEAN. Ini memungkinkan pembuat kebijakan dan penyedia layanan untuk mengembangkan intervensi berdasarkan keadaan unik dan kepentingan terbaik dari setiap korban, terlepas dari keterbatasan dalam kebijakan dan undang-undang yang ada.
14. Memastikan bahwa campur tangan apa pun terhadap kebebasan bergerak atau kemerdekaan untuk alasan keamanan hanya berdasarkan penilaian risiko secara individu yang dilakukan oleh polisi bekerja sama erat dengan korban, dan bahwa setiap pembatasan yang dikenakan adalah persyaratan minimum untuk mengurangi ancaman yang kredibel terhadap keselamatan dan keamanan korban.
15. Memastikan bahwa bagi para korban yang penilaian risikonya telah mengakibatkan tinggal di rumah aman tertutup, penilaian risiko perlu dilakukan secara terus-menerus dan sering diperbarui dalam menanggapi situasi korban yang terus berkembang, untuk meninjau kebutuhan tinggal di rumah aman yang sedang berlangsung.
16. Terus mengembangkan dan memperkuat pilihan bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pidana tanpa harus tinggal di rumah aman, termasuk melalui kesaksian di muka, kesaksian video, atau dengan korban yang dipulangkan kembali untuk bersaksi dalam proses pengadilan. Demikian pula, upaya terbaik harus dilakukan untuk mengurangi durasi proses hukum dalam kasus perdagangan orang, khususnya dalam kasus ketika pergerakan korban dibatasi, termasuk dengan menggunakan pengadilan khusus, hakim dan jaksa yang terlatih khusus dan dengan sensitisasi kepada hakim dan jaksa akan dampak buruk penundaan terhadap orang-orang yang diperdagangkan.

17. Memandang penyediaan rumah aman bukan sebagai sarana untuk memajukan tujuan peradilan pidana tetapi sebagai bagian dari rangkaian pemulihan, rehabilitasi, dan dukungan reintegrasi bagi korban perdagangan orang. Dengan demikian, penting untuk mengembangkan atau meningkatkan standar minimum untuk rumah aman Pemerintah atau non-Pemerintah sesuai dengan pemahaman internasional tentang pemulihan dan (re)integrasi, sebagai dasar untuk mengembangkan kriteria berbasis hak untuk memantau fasilitas rumah aman termasuk kriteria tentang kebebasan pergerakan dan kemerdekaan.

18. Mengadopsi beberapa prinsip yang sama yang digunakan dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 untuk krisis di masa mendatang atau situasi kemanusiaan yang mungkin terjadi. Prinsip-prinsip ini termasuk: Fokus pada pendekatan yang berpusat pada korban selama proses berlangsung; Meningkatkan kolaborasi lintas lembaga/sector dan multi-level agar dapat terus memberikan layanan dan dukungan penting; Menyelaraskan protokol internal di antara lembaga pemerintah dan penyedia layanan untuk meminimalkan kebingungan dan gangguan terhadap dukungan korban; dan Memanfaatkan fasilitas dan jaringan layanan yang ada untuk mendukung kelompok rentan yang membutuhkan bantuan darurat.



# REFERENSI

ASEAN (2016). Pedoman Peka Gender untuk Penanganan Perempuan Korban Perdagangan Orang. Jakarta: Sekretariat ASEAN.

ASEAN (2023). Panduan Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan ASEAN: Melindungi Hak Korban Perdagangan Orang. Jakarta: Sekretariat ASEAN.

Cordisco Tsai, L., Lim, V., Nhanh, C., & Namy, S. (2022). "Mereka Tidak Memperhatikan atau Mau Mendengar Ketika Kami Berbicara": Pengalaman Perempuan di Rumah Aman Khusus Perdagangan Orang di Kamboja. *Affilia*, 37(1), 151–168.

Gallagher, A dan McAdam, M (ND). 'Catatan Informasi tentang Kebebasan Bergerak bagi Korban Perdagangan Orang'. ASEAN-Australia Counter Trafficking.

Gallagher, A dan Pearson, E (2010) 'Harga Tinggi Kebebasan: Analisis Hukum dan Kebijakan pada Rumah aman Detensi untuk Korban Perdagangan', *Human Rights Quarterly* 32 (2010) 73-114.

McAdam, M (2018). Kebebasan bergerak bagi orang yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang: Analisis hukum, kebijakan dan praktik di Kawasan ASEAN. ASEAN-Australia Counter Trafficking.

McAdam, M (2022) Implementasi Prinsip Tanpa Hukuman Bagi Korban Perdagangan Orang di Negara Anggota ASEAN, ASEAN-Australia Australia Counter Trafficking.

Nordin, R. (2019). Perlindungan Hak Korban Perdagangan Orang: Apakah Malaysia Sudah Melakukan Cukup? *Jurnal Hak Asasi Manusia Asia Tenggara*, 300–316.

Surtees R (2013). Setelah Perdagangan: Pengalaman dan Tantangan dalam (Re)Integrasi Orang-orang yang Diperdagangkan di Daerah Sub Regional Mekong. Bangkok, Thailand: UNIAP/ NEXUS Institute.





KOMISI ASEAN UNTUK PROMOSI DAN  
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

---